

RINGKASAN PENELITIAN

PERUMUSAN MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM DAN PEMETAAN POTENSI EKONOMI BAGI MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DI PROPINSI RIAU (Penelitian Fundamental, Tahun I)

Oleh: Almasdi Syahza dan Suarman

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan potensi yang ada di daerah perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Propinsi Riau yang sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir masih mempunyai banyak daerah-daerah terisolir dan penduduk miskin dengan keterbatasan sarana transportasi akibat kondisi geografis daerah yang pada umumnya berawa. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengintensifkan kegiatan pembangunan yang orientasinya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara untuk membuat prioritas-prioritas pembangunan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun rencana strategis Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan program pembangunan ekonomi khususnya untuk daerah pedesaan.

Keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Dari data yang ada diperoleh informasi jumlah rumah tangga miskin sebanyak 25.863 rumah tangga (RT) yang terdiri dari 114.496 jiwa.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaen Kepulauan Meranti termasuk agak rumit bila dibandingkan dengan pembangunan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kondisi ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi di daerah, antara lain: 1) kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau; 2) angka

kemiskinan masih relatif tinggi; 3) terbatasnya infrastruktur; 4) rendahnya kualitas SDM; dan 5) degradasi lingkungan hidup.

Angka Kemiskinan dan Issue Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) angka kemiskinan relatif tinggi (42,5%); 2) infrastruktur dasar belum memadai; 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; 4) fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas; 5) angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi; 6) penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional; 7) perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.

Perspektif pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) Pengembangan kawasan ekonomi khusus di Selatpanjang dan Ransang; 2) Pengembangan cluster industri berbasis pertanian; 3) Pengembangan kawasan pelabuhan dan industri Dorak; 4) Pengembangan kawasan industri Tebing tinggi Barat; 5) Pengembangan kawasan industri Pulau Ransang; 6) Pengembangan komoditas unggulan daerah dalam rangka ketahanan pangan Operasi Pangan Riau Makmur; 7) Pengembangan perikanan, penangkapan ikan dan budidaya ikan khususnya patin jambal dan pertambakan udang; 8) Pengembangan bidang peternakan khususnya ternak sapi, kambing, dan itik; 9) Revitalisasi perkebunan karet, kelapa, sagu, kopi dan kakao.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk prioritas pembangunan jangka menengah Tahun 2011-2015: 1) Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif; 2) Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; 4) Meningkatkan sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi local; 5) Meningkatkan Infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi; 6) Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi; dan 7) Meningkatkan pembinaan mental spritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.